

Maret 2023



# BULETIN BHINNEKA NARA EKA BHAKTI

*Edisi Dies Natalis IPDN ke-67*



**JELAJAH  
ILMU**

**IPDN  
CORNER**

**MENGENAL  
LEBIH DEKAT**

**PENGABDIAN  
MASYARAKAT**

**PRAJAPEDIA**

**SEPUTAR  
PEMERINTAHAN**

# DAFTAR ISI

## REDAKSI

Susunan Redaksi  
Salam Redaksi

## HEADLINE

1. Kendalikan Harga Layanan Penerbangan, Mendagri Minta Pemda Bantu Jaga Keterisian Penumpang
2. Presiden Jokowi Tegaskan Tentang Kewaspadaan Terhadap Turbulensi Ekonomi

## IPDN CORNER

1. Sejarah IPDN
2. Menggaet Praja IPDN, Provinsi Sulbar Siapkan Inovasi Data Presisi
3. IPDN Siap menuju *World Class University*
4. "Dukcapil Goes To Campus" Hadir di IPDN Kampus Jatinangor
5. Irjen Kemendagri Tegaskan Bahaya Laten Korupsi didepan praja IPDN

## JELAJAH ILMU

1. Menguatkan Peran Purna Praja dalam Politik Kebangsaan di Era Digital
2. Isu Penghapusan Jabatan Gubernur, Efisien Kah?

## PENGABDIAN MASYARAKAT

IPDN Bergerak Cepat menuju Lokasi Bencana Banjir di Manado

## PRAJAPEDIA

1. Tanamkan Cinta Tanah Air, Praja IPDN Laksanakan Pembaretan di Gunung Manglayang
2. Pengkaderan Praja
3. Praja IPDN Siap Mengikuti Seleksi LPDP

## MENGENAL LEBIH DEKAT

Mengenal Lebih Dekat Rektor IPDN

# SUSUNAN REDAKSI

### Penanggungjawab

Dr. Drs. Hadi Prabowo, M.M.

### Redaktur

Dr. Djoko Susilo

### Sekretariat

1. Dr. Deti Mulyati, S.H., M.H., CN.
2. Dr. Drs. Arief M. Edie, M.Si.
3. La Ode Muhamad Alam Jaya, S.STP., M.Si.
4. Sutiyo, S.STP., Ph.D.
5. Haris Wijayanto, S.STP.
6. Aestraiko Sujantor S. Rombe, S.STP, M.Si

### Penyunting / Editor

1. Yudha Mardhatillah, S.STP, M.Si
2. Febtado Abdiansyah, S.STP, M.Tr.IP
3. Levina Barinda Widyadhana, S.Tr.IP

### Desain Grafis

1. Eko Wiratmoko, S.STP, M.Tr.IP
2. M. Wahyu Adi Widyantoro, S.STP
3. Salahudin Ansari, S.Tr.IP
4. Khairatul Fatati, S.Tr.IP

### Fotografer

1. M. Fajar Farazi, A.Md
2. Ahmad Edwar Armandes, S.Kom
3. Ramdhani, A.Md
4. Arif Sapta Pamungkas

### Pembuat Artikel

1. Nindy M. Mayangswari, S.IKom, M.IKom
2. Indira Setia Ningtias, S.STP, M.Tr.IP
3. M. Aulia Addin, S.STP.
4. Jajang Rustoni, S.Sos
5. Tita Salati

# SALAM REDAKSI

Buletin Bhineka Nara Eka Bhakti adalah buletin internal Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang terbit setiap 1 bulan sekali. Diambil dari bahasa Sansekerta, Bhineka Nara Eka Bhakti merupakan semboyan yang dianut praja IPDN yang bermakna "walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu pengabdian". Semboyan ini merupakan representasi dari tujuan didirikannya IPDN oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Maret 1956.

Saya harap buletin ini dapat menjadi wadah informasi, saluran komunikasi dan ajang aspirasi bagi seluruh Aparatur Sipil Negara dan praja di lingkungan IPDN. Buletin ini juga diharapkan dapat menjadi sebuah bentuk apresiasi kami untuk semua Aparatur Sipil Negara dan praja IPDN yang telah berdedikasi tinggi bagi kemajuan IPDN. Selamat Membaca.



## KENDALIKAN HARGA LAYANAN PENERBANGAN, MENDAGRI MINTA PEMDA BANTU JAGA KETERISIAN PENUMPANG

Jakarta- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) membantu pemerintah pusat menjaga tingkat keterisian penumpang (load factor) pada sektor layanan penerbangan. Upaya ini dilakukan untuk menekan inflasi yang disebabkan tingginya harga avtur sehingga membuat tiket penerbangan menjadi mahal.

“Pemda diminta untuk membantu terutama kepala daerah keterisian

penumpang agar load factor-nya cukup. Istilahnya semacam dibuat block seat, jadi dijamin seat-nya akan terisi,” katanya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Lebih lanjut, load factor tersebut menjamin dan menentukan Break Even Point (BEP) agar operator atau maskapai tidak rugi. Karenanya, hal tersebut perlu menjadi perhatian Pemda agar daerah-daerah yang memiliki bandara pesawatnya bisa beroperasi. Jika bandara beroperasi, Mendagri menyampaikan yang diuntungkan tidak hanya maskapai, tetapi juga Pemda dan masyarakat.

“Masyarakat tidak diberatkan karena (angkutan udara) berdampak kepada inflasi penyumbang nomor satu, (sebesar) 1,81 persen,” tuturnya.

Mendagri menyampaikan, pemerintah pusat khususnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM), dan Kementerian Perdagangan telah melakukan upaya intervensi terkait dengan kenaikan harga avtur tersebut. Tak hanya soal harga, tetapi juga soal penyediaan spare part pesawat dan relaksasi pajak.



“Juga kalibrasi stimulus penerbangan. Di antaranya adalah relaksasi pajak untuk operator. Ini upaya-upaya yang sedang dilakukan, permasalahan yang sedang dilakukan di tingkat pusat oleh Kementerian Perhubungan,” ujarnya.

Memperjelas paparan Mendagri, Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Udara Kemenhub Maria Kristi Endah Murni menegaskan, biaya operasional pesawat yang paling tinggi untuk pesawat adalah penggunaan avtur. Jika tingkat keterisian kursi penumpang rendah, maka akan menyebabkan mahalnya harga tiket. Hal ini disebabkan, maskapai akan menaikkan harga mendekati tarif batas sebagaimana yang telah pemerintah tetapkan.

Lebih lanjut, jika dalam satu rute angka load factor kurang dari 65 persen, dipastikan harga tiket akan lebih mahal.



08-02-2023 | 14:53 WIB

Karena itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa gubernur dan bupati untuk membantu keterisian penumpang dalam satu pesawat di satu rute.

“Yang sudah berhasil itu Bapak Gubernur Sulawesi Selatan ya, yang sudah bisa mengisi atau memenuhi keterisian penumpang di daerah Toraja. Kemudian di Jawa Tengah juga, Bupati Ngloram, itu juga beberapa waktu yang lalu sudah berhasil menjaga keterisian penumpang sehingga rute atau bandara tersebut dapat diterbangi,” tandasnya.

Sumber : Website Resmi Kemendagri

## PRESIDEN JOKOWI TEGASKAN TENTANG KEWASPADAAN TERHADAP TURBULENSI EKONOMI

Bogor (17/01/2023)-Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Dr. Drs. Hadi Prabowo., M.M beserta jajaran pimpinan IPDN lainnya turut serta dalam kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forkopimda tahun 2023 yang diselenggarakan di Sentul International Convention Center Bogor. Selain kehadiran jajaran pimpinan, IPDN pun memberikan dukungan penuh untuk penyelenggaraan kegiatan ini dengan mengikutsertakan paduan suara Gita Abdi Praja untuk membantu memeriahkan acara tersebut. Rakornas yang dihadiri oleh 4.545 orang dibuka langsung oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo. Mengangkat tema “Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi”, Mendagri Tito Karnavian dalam sambutannya berharap seluruh nara sumber dalam acara ini dapat memberikan masukan dan arahan tentang langkah-langkah aplikatif yang harus dikerjakan oleh daerah.

Presiden Joko Widodo menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh peserta Rakornas dan seluruh masyarakat Indonesia atas kerja kerasnya dalam menangani covid-19, “Kita berhasil mengelola dan mengendalikan pandemi dengan baik.





Kita juga bisa memmanage stabilitas ekonomi, kita pertahankan sehingga berada pada posisi yang sangat baik, ini berkat kerja keras kita semuanya”, tuturnya. Jokowi juga kembali menegaskan terkait kewaspadaan dalam menghadapi tahun turbulensi ekonomi, “Ekonomi kita ada diposisi yang baik, perkiraan pada tahun 2022 sebesar 5,2 atau 5,3% ini sebuah prestasi yang baik.

Namun kita harus tetap waspada karena tahun 2023 masih merupakan tahun ujian bagi ekonomi kita dan ekonomi global. Maka kita harus membuat kebijakan dengan hati-hati semuanya harus berbasis data di lapangan” ujarnya. Masih menurutnya, sepertiga ekonomi dunia diprediksi akan mengalami resesi. Kini 47 negara sudah masuk menjadi pasien IMF karena resesi pasca pandemi dan perang, inilah yang membuat kita harus memiliki frekuensi yang sama dalam menghadapi situasi ekonomi yang tidak mudah. Selain tentang ekonomi dan resesi, Presiden Jokowi juga kembali mengingatkan peserta rakornas untuk aktif dalam menghadapi permasalahan stunting, inflasi dan kemiskinan ekstrem. “Penanganan stunting juga menjadi prioritas nasional, tahun 2024 nanti target angka stunting di Indonesia harus mencapai 14%. Pada kesempatan ini saya memberikan apresiasi tinggi untuk Kabupaten Sumedang yang telah berhasil menciptakan platform digital dalam memonitoring angka stunting di daerahnya sehingga dalam kurun waktu 3 tahun angka stuntingnya dari 22% bisa menjadi 7%”, ujarnya. Inflasi menurutnya masih menjadi momok menakutkan di seluruh negara, namun yang patut disyukuri ialah inflasi Indonesia berada diangka 5,5%. Senada dengan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, Mendagri Tito Karnavian dalam sambutannya juga menyampaikan bahwa investasi menjadi kunci pertumbuhan ekonomi kita, “Pertumbuhan ekonomi nasional terus menunjukkan angka positif yakni mencapai angka 5,72%, tingkat inflansi juga terkendali dengan baik sampai dengan bulan September 2022 di angka 5,95%, bulan Oktober 2022 di angka 5,71%, November 2022 di angka 5,42% sedangkan Desember diangka 5,51%”, tuturnya.

Acara rakornas kali ini akan dibagi menjadi 4 panel dengan masing-masing tema yakni, tema I terkait pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi, tema II terkait penguatan investasi, hirilisasi dan kemudahan perizinan berusaha,

tema III terkait penanganan covid-19, stunting, kemiskinan, pengangguran, pendidikan dan jaring pengaman sosial serta tema IV tentang stabilitas politik, hukum, keamanan dan pengawasan.

Berikut ini adalah nara sumber dalam acara Rakornas 2023 yakni, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Kordinator Kemaritiman dan Investasi, Menteri Investasi, Menpan RB, Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Menteri Agraria dan tata ruang/Kepala BPN, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Tenaga Kerja, Menkopolkam, Kepala Badan Intelejen Negara, Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BPKP, Kepala Badan Pusat Statistik, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Badan Pangan Nasional, Bupati Sumedang dan Prof. Yohanes Surya (ahli fisika dan metematika).

Sumber : Humas IPDN







## SEJARAH IPDN

Sejarah Institut Pemerintahan Dalam Negeri mulai dikembangkan sejak masa Hindia Belanda dimana pada tahun 1920 dibentuk kelas sekolah pendidikan pamong praja yang bernama OSVIA yang kemudian berubah menjadi MOSVIA. Pada saat itu para lulusannya dibutuhkan dan dimanfaatkan untuk memperkuat penyelenggaraan Pemerintahan Hindia Belanda.

Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1948 dibentuk lembaga pendidikan dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri yaitu Sekolah Menengah Tinggi Pangreh Praja yang kemudian berubah menjadi Sekolah Menengah Pegawai Pemerintahan Administrasi Atas. Pada tahun 1952 Departemen Dalam Negeri melaksanakan Kursus Dinas C untuk meningkatkan kemampuan pegawai Golongan D, kemudian pada 17 Maret 1956 Presiden Soekarno meresmikan sebuah sekolah dengan nama Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) di Malang, Jawa Timur.

Selanjutnya Presiden Soeharto pada tahun 1967 membentuk Institut Ilmu Pemerintahan yang juga bertempat di Malang, Jawa Timur menyesuaikan dengan kebutuhan akan pembaharuan. Pada tahun 1992 APDN ditingkatkan menjadi STPDN.



Amanat Presiden Republik Indonesia ke-1  
Dr (HC) Ir. Soekarno  
17 Maret 1956  
Berdirinya APDN

"Pendidikan Sekolah pamong Praja sangat penting dan dibutuhkan dalam mengisi kemerdekaan khususnya penyelenggaraan pemerintahan. Berdirinya APDN, hendaknya merupakan suatu pusat investment of human skills dan mental improvement dan pentingnya managerial skills dan efisiensi administrasi didalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan"

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri di tahun 2004 dilakukan peleburan antara IIP dan STPDN menjadi IPDN dan di tahun 2009 terjadi perubahan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 menjadi Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 terkait Pembentukan Kampus Daerah IPDN pada 15 Juni 2015 IPDN ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo sebagai kampus pelopor dan penggerak revolusi mental.

## Menggaet Praja IPDN, Provinsi Sulbar Siapkan Inovasi Data Presisi



Jatinangor (09/01/2023), Institut Pemerintahan Dalam Negeri mendapatkan bantuan berupa kendaraan operasional untuk praja IPDN dari PJ. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Dr.Drs. Akmal Malik M.Si. Rektor IPDN, Dr. Drs. Hadi Prabowo., M.Si menyambut hangat kehadiran rombongan dari Provinsi Sulawesi Barat ini. Selain memberikan kendaraan operasional, kehadiran Akmal Malik juga untuk menjalin kerja sama dengan IPDN terkait pengumpulan data presisi di Provinsi Sulawesi Barat. "Terima kasih kepada Bapak Gubernur Sulbar atas bantuan yang diberikan untuk praja IPDN, saya juga memberikan selamat kepada Akmal Malik atas inovasinya merupakan legacy untuk alumni IPDN di Sulbar.

Semoga dengan adanya inovasi ini pembangunan di Sulawesi Barat akan semakin cepat dan semakin makmur", ujar Hadi.

Tak hanya memberikan bantuan, kehadiran Gubernur Sulawesi Barat ke IPDN juga dalam rangka menerima penghargaan Kartika Pamong Praja Madya. Penghargaan ini diberikan diberikan atas pengabdian dan tauladan yang telah dipersembahkan Beliau kepada bangsa dan negara Indonesia. Akmal mengatakan bahwa inovasi yang sedang dibangunnya di Sulawesi Barat diharapkan mampu memberikan kebanggaan pula kepada IPDN karena pioneer inovasi ini merupakan alumni IPDN. "Sulbar saat ini berusaha menggagas sebuah terobosan atau inovasi terkait data presisi dimana pengagasnya merupakan purna-purna IPDN, jadi Pak Rektor saya mewakili seluruh masyarakat Sulbar ingin mengucapkan terima kasih karena di lapangan semua purna IPDN ini tidak ada yang mengecewakan", tuturnya.

Sumber: Humas IPDN



## IPDN Siap Menuju World Class University

Jatinangor (10/01/2023) Institut Pemerintahan Dalam Negeri terus bertransformasi menuju world class university. Salah satu langkah yang dilakukan dalam mencapainya ialah dengan dibangunnya gedung perpustakaan milenial dan juga renovasi gedung menza dan gedung balairung rudini yang ada di lingkungan IPDN kampus Jatinangor.

Menteri Dalam Negeri, Prof. Drs. H. Muh. Tito Karnavian., M.A., Ph.D hadir bersama pejabat di lingkup Kemendagri dalam peresmian gedung ini.

Menurut Rektor IPDN, Dr. Drs. Hadi Prabowo., M.M gagasan renovasi gedung menza, gedung balairung dicetuskan oleh Mendagri langsung pada saat meninjau kampus IPDN pada tahun 2020 dengan harapan memberikan kenyamanan, kebanggaan dan kewibawaan bagi praja dan lembaga. "Lalu untuk menunjang transformasi IPDN menuju world class university, kami membuat Gedung perpustakaan berbasis digital bekerja sama dengan perpustnas", tutur Hadi.

Gedung perpustakaan IPDN tidak hanya dilengkapi dengan perpustakaan berbasis digital sebanyak 2 lantai, tapi juga dilengkapi dengan fasilitas laboratorium bahasa, media center untuk memfasilitasi rekan-rekan pers yang meliput informasi terkait IPDN, co-working space area, kantor Bank Negara Indonesia (BNI), kantor Bank Jabar Banten dan beberapa space untuk praja berdiskusi dan membaca.

Menurut Rektor IPDN, Dr. Drs. Hadi Prabowo., M.M gagasan renovasi gedung menza, gedung balairung dicetuskan oleh Mendagri langsung pada saat meninjau kampus IPDN pada tahun 2020 dengan harapan memberikan kenyamanan, kebanggaan dan kewibawaan bagi praja dan lembaga. "Lalu untuk menunjang transformasi IPDN menuju world class university, kami membuat Gedung perpustakaan berbasis digital bekerja sama dengan perpustnas", tutur Hadi.



Gedung perpustakaan IPDN tidak hanya dilengkapi dengan perpustakaan berbasis digital sebanyak 2 lantai, tapi juga dilengkapi dengan fasilitas laboratorium bahasa, media center untuk memfasilitasi rekan-rekan pers yang meliput informasi terkait IPDN, co-working space area, kantor Bank Negara Indonesia (BNI), kantor Bank Jabar Banten dan beberapa space untuk praja berdiskusi dan membaca.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rektor yang telah mengeksekusi arahan yang saya sampaikan kepada Beliau. Jantung pemerintahan Indonesia ini ada pada birokrat dan IPDN menempati posisi penting dalam mencetak kader-kader birokrat. Jadi IPDN harus betul-betul menjadi kebanggaan Indonesia, harus dapat menjadi center of excellent", ujar Mendagri.



Beliau juga kembali mengingatkan bahwa untuk menjadi pusat pendidikan dan penggodokan calon pemimpin birokrat, IPDN harus terus bertransformasi mengikuti perkembangan jaman.

Selain peresmian gedung perpustakaan, kehadiran Mendagri juga untuk menyaksikan penganugerahan kartika pamong praja madya yang diberikan oleh IPDN kepada Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru., S.H., M.M. Beliau hadir di IPDN sekaligus memberikan bantuan berupa 2 unit bus untuk kendaraan operasional praja IPDN. "Penyerahan bantuan ini merupakan bentuk dukungan yang nyata dari pemerintahan Sumatera Selatan untuk IPDN.



Bantuan ini bukan hanya simbol namun didalamnya ada harapan besar kepada para generasi baru lulusan IPDN akan menjadi yang terbaik dan mampu menjalani birokrasi dan melayani masyarakat", ujar Herman.

Pada kesempatan ini, Rektor juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut membantu



dalam pembangunan infrastruktur IPDN, "Saya ucapkan terima kasih kepada para alumni baik alumni APDN maupun alumni IPDN, IKAPTK, Pemerintah Daerah dan mitra kerja yang turut membantu menyumbangkan prasarana dalam renovasi gedung menza", ujarnya.

Sumber: Humas IPDN

## “Dukcapil Goes to Campus” Hadir di IPDN Kampus Jatinangor

Jatinangor (16/01/2023), Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh., S.H., M.H mengatakan bahwa praja sebagai kader pemerintahan diharapkan bisa menjadi branding baru produk dukcapil. Hal ini disampaikan Zudan Arif saat menghadiri acara “Dukcapil Goes to Campus” yang diselenggarakan di kampus IPDN Jatinangor pada tanggal 18 s.d. 21 Januari 2023. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama IPDN dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri, Dukcapil Provinsi serta Dukcapil Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat. Dukcapil Goes to Campus merupakan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan pembuatan KTP digital bagi ASN dan praja di lingkungan IPDN. “Kegiatan ini terlaksana sebagai bentuk pelayanan untuk masyarakat, kami berusaha lebih proaktif melayani masyarakat dengan mendatangi langsung subjek-subjek yang dirasa perlu mendapatkan pelayanan agar masyarakat mendapatkan kemudahan”, ujarnya. Masih menurutnya IPDN menjadi pilihan Dukcapil dalam melaksanakan kegiatan ini karena IPDN khususnya praja nantinya dinilai dapat bekerja bersama Dukcapil untuk turut serta dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat Indonesia. “Kita mulai bergerak dari manual menjadi digital, hal ini dilaksanakan demi menuju Indonesia Single Identity Number Digital dan semoga kegiatan ini dapat memberikan inspirasi kepada seluruh calon-calon aparatur sipil negara untuk bekerja dengan mengaplikasikan sistem digital dalam pekerjaannya”, ujarnya.



Rektor IPDN, Dr. Drs. Hadi Prabowo., M.M menyambut antusias pelaksanaan kegiatan ini, Beliau juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Ditjen Dukcapil khususnya kepada Zudan Arif atas bantuan dan perhatian Beliau kepada IPDN. “Terima kasih kepada Prof. Zudan atas atensinya yang besar terhadap IPDN. Selain pelaksanaan kegiatan ini, sebelumnya berkat ide dan gagasan serta sikap proaktif Beliau untuk memajukan pendidikan di IPDN maka IPDN mendapatkan hibah Laboratorium Dukcapil.

Ini merupakan hal luar biasa yang telah Beliau lakukan untuk kami. Dengan adanya laboratorium, praja dapat secara langsung mempraktekan teori-teori yang telah mereka

dapatkan selama pendidikan. Praja sekarang jadi bisa mempraktekan pembuatan dokumen kependudukan dan catatan sipil”, tuturnya.

Hal ini juga lah yang akhirnya melatarbelakangi IPDN memberikan penghargaan Kartika Astha Brata Madya kepada Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh., S.H., M.H atas jasa dan pengabdianya kepada negeri termasuk kepada Kemendagri dan IPDN.

Hadi mengatakan bahwa rombongan dari Dukcapil ini akan membantu praja dan ASN IPDN dalam mengaktivasi Identitas Kependudukan Digital, “Dengan adanya Identitas Kependudukan Digital kita akan lebih mudah karena identitas kita tidak harus berbentuk E-KTP sehingga apabila KTPnya ketinggalan atau hilang kita cukup mengakses aplikasi ini”, ujarnya. Masih menurutnya, praja dan ASN IPDN hanya perlu menyebutkan NIK kepada petugas Dukcapil untuk kemudian mereka harus mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital, nantinya para petugas akan membantu proses aktivasi aplikasi tersebut. Selain KTP digital, dalam aplikasi tersebut juga memuat Kartu Keluarga, Kartu BPJS, Kartu Indonesia Sehat dan juga data pemilih pemilu.

Sumber : Humas IPDN

## Irjen Kemendagri Tegaskan Bahaya Laten Korupsi didepan praja IPDN

Gowa, (15/03/2022). Tegaskan terkait bahaya laten korupsi, Inspektur Jenderal Kemendagri Komjen Pol. Drs. Tomsu Tohar, M.Si berikan pemahaman dan perkembangan terbaru tentang korupsi didepan praja dan civitas akademika IPDN kampus Sulawesi Selatan. Tomsu mengatakan bahwa sepanjang tahun 2021 sudah ada 533 kasus korupsi yang membuat negara rugi 29 triliun lebih, hal ini diperkuat dengan hasil Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2021 memiliki skor 38 dan berada di peringkat 96. Namun pada tahun 2022 Indeks Persepsi Korupsi mengalami penurunan sebesar 4 poin menjadi 34. Hal ini menurutnya perlu dipahami oleh praja IPDN sebagai calon Aparatur Sipil Negara. Menurutnya, praja IPDN harus memiliki integritas yang tinggi agar dapat menghindari bahaya korupsi. “Sebagai calon ASN di masa datang, saya harap praja mulai dari sekarang dapat bekerja keras membangun karakter diri terutama karakter sebagai pelayanan masyarakat”, ujarnya. Rentannya permasalahan hukum yang menjerat beberapa kepala daerah di Indonesia ini tak terlepas dari faktor sistem, integritas dan budaya yang salah. “Untuk itulah praja IPDN harus memperkuat nilai-nilai integritas dalam dirinya, diantaranya kesederhanaan, sikap adil, konsisten, jujur namun rendah hati, bertindak bagaikan tengah diawasi, menyadari hal-hal kecil, berpegang teguh pada kebenaran, bertanggung jawab, menjaga kepercayaan dan menepati janji”, tutur Tomsu.







## Apel Pencanangan Dies Natalis ke-67 IPDN

Jatinangor (21/02/2023), Sekolah kedinasan kebanggaan Indonesia yakni Institut Pemerintahan Dalam Negeri pada tanggal 17 Maret nanti akan menginjak usia 67 tahun. Dalam menyambut Dies Natalis ke-67 tahun ini, IPDN menyelenggarakan serangkaian acara antara lain stadium general, seminar nasional, orasi ilmiah, kegiatan donor darah dan beberapa perlomba seperti lomba debat wawasan kebangsaan, inovasi teknologi pelayanan pemerintahan, paduan suara, film pendek, olahraga dan lain sebagainya. Rektor IPDN Dr. Drs. Hadi Prabowo, M.M menyambut antusias seluruh rangkaian kegiatan dalam rangka Dies Natalis IPDN ini, menurutnya sesuai dengan perkembangan zaman, Dies Natalis IPDN tahun ini mengangkat tema “Melalui Optimalisasi Digitalisasi Kita Tingkatkan Profesionalisme Kader Pamong Praja Menuju Tata Kelola Pemerintahan Kelas Dunia”. IPDN sudah mulai melaksanakan beberapa kegiatan menjelang Dies Natalis ke-67 sejak tanggal 21 Februari 2023 hingga nanti diselenggarakan acara puncak pada tanggal 17 Maret 2023.



Menurut Hadi, pelaksanaan dies natalis ini diharapkan dapat mempererat jalinan silaturahmi antar civitas akademika IPDN, “Selain menjalin silaturahmi, rangkaian kegiatan dies natalis tahun ini digelar untuk dapat menumbuhkembangkan rasa kebersamaan, kreativitas, minat bakat, jiwa sosial, sportivitas dari civitas akademika IPDN”, ujarnya. Masih menurutnya, dengan beragam lomba yang juga turut mengundang perguruan tinggi lainnya ini, diharapkan dapat mengasah jiwa-jiwa inspiratif, inovatif dan solutif dari praja dan aparatur sipil negara IPDN.



Tak hanya rangkaian perlombaan, Hadi mengatakan bahwa IPDN juga akan melaksanakan stadium general dengan mengundang beberapa gubernur untuk menjadi narasumber acara, “Direncanakan tanggal 8 Maret 2023 nanti akan dilaksanakan stadium general dengan tema strategi kebijakan pembangunan daerah dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi menurunkan angka kemiskinan dan penanganan stunting serta masalah-masalah daerah lainnya”, ujarnya. Selain itu, pada tanggal 14 Maret 2023 direncanakan pula akan dilaksanakan seminar nasional yang mengusung tema “Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 dalam Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas, Demokratis, Jujur, Adil dan Bermartabat, “Pada seminar tanggal 14 maret nanti kami akan mengundang pejabat Komisi II DPR RI, Komisi Pemilihan Umum Indonesia, Badan Pengawas Pemilu dan beberapa narasumber lainnya”, tutur Hadi.



Menurut Hadi, pelaksanaan dies natalis ini diharapkan Dies natalis IPDN tahun ini tak hanya diikuti oleh civitas akademika IPDN, tapi juga turut mengikutsertakan perguruan tinggi se-Jawa Barat, “Sekitar tanggal 24 Februari sampai dengan 14 Maret akan diadakan perlombaan penalaran, seni fotografi, kesenian dan olahraga antar perguruan tinggi se-Jawa Barat, diantaranya perlomba debat wawasan kebangsaan, inovasi teknologi dan non teknologi pelayanan pemerintahan, lomba bernyanyi, lomba bola voli, tenis lapangan, bulu tangkis dan tenis meja”, ujarnya.

Khusus terkait pengabdian masyarakat, IPDN juga akan menggelar khitanan masal bagi masyarakat sekitar kampus IPDN juga kegiatan donor darah yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 s.d. 14 Maret 2023.

Sumber :

Kepala Bagian Kerja Sama dan Humas  
La Ode Muhamad Alam Jaya, S.STP., M.Si



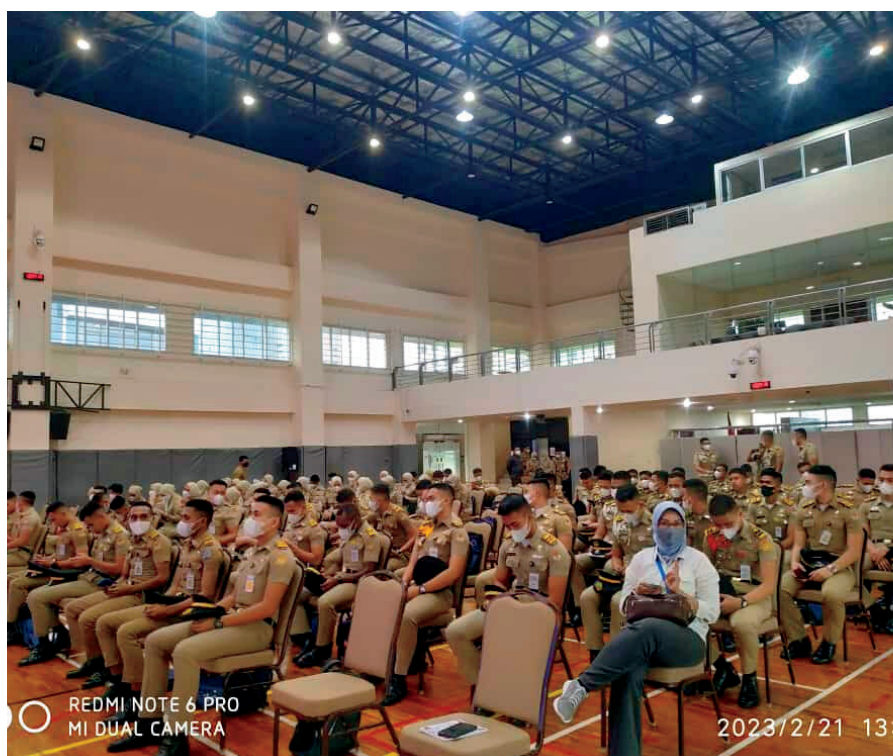


## Studi Perspektif Praja IPDN Kampus Jakarta ke KPK

Jakarta (21/02/2023), Proaktif tanamkan pendidikan anti korupsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri melalui fakultas politik pemerintahan mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi. Dr. Ir. Wawan Wardiana, M.T selaku Deputy Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, menyempatkan diri menjadi narasumber dalam kegiatan ini. Rektor IPDN, Dr. Drs. Hadi Prabowo, M.M yang pada kesempatan ini diwakili oleh Direktur IPDN kampus Jakarta Dr. Prio Teguh, S.H., M.Si mendukung penuh kegiatan ini, Beliau mengatakan bahwa kunjungan IPDN kampus Jakarta ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih matang lagi terkait pemberantasan korupsi di Indonesia. "Praja harus lebih sadar dan waspada pada tindak pidana korupsi yang begitu erat kaitannya dengan birokrasi dan pelayanan publik. Jadi nantinya kami harap praja dapat menjadi kader pemerintahan yang berintegritas dan bebas dari korupsi", ujar Prio.



Pada kesempatan ini, praja diberikan pemahaman tentang kondisi korupsi di Indonesia. Hal ini disampaikan Wawan Wardiana pada saat memaparkan materi terkait pendidikan antikorupsi dan pembangunan integritas. Menurutnya berdasarkan hasil Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia dimana pada tahun 2022 Indonesia mengalami penurunan indeks yaitu sebanyak 34 poin dari 100 poin yang membawa Indonesia pada peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei.



Mengatasi permasalahan tersebut, KPK memiliki strategi pemberantasan korupsi yang terdiri dari tiga poin utama, yaitu By Education (membangun nilai), By Prevention (perbaikan sistem), dan By Enforcement (efek jera)." Penurunan IPK tersebut merupakan tanggungjawab bersama yang tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh KPK itu sendiri. Partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan dan merupakan kunci utama dalam rangka memberantas korupsi yang ada", tuturnya.



Masih menurutnya, IPDN sebagai perguruan tinggi kedinasan juga dapat memberikan peran untuk pemberantasan korupsi, salah satunya dengan diselenggarakannya pendidikan antikorupsi sebagai mata kuliah yang terintegrasi pada mata kuliah yang relevan dalam menciptakan ekosistem melalui pembangunan integritas ekosistem pendidikan yang mendukung habituasi, keteladanan dan pengalaman integritas serta berperan dalam mendukung aksi integritas melalui peran yang aktif dalam gerakan antikorupsi melalui Tridharma Perguruan Tinggi dan kegiatan lainnya.

Sumber : Humas IPDN





# JELAJAH



## Menguatkan Peran Purna Praja dalam Politik Kebangsaan di Era Digital

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pemuda di Indonesia pada tahun 2021 lalu terhitung sebanyak 64,92 juta jiwa. Dari sisi besaran absolut, jumlah pemuda kita terus bertambah setiap tahunnya. Lebih rincinya, terdapat 39,80% pemuda yang berada di rentang usia 19-24 tahun, kemudian ada 39,33% pemuda berumur 25-30 tahun. Sementara, pemuda berusia 16-18 tahun mencapai angka 20,87%.

Potensi besar generasi muda Indonesia tersebut bila tidak digarap dengan optimal oleh pemerintah nantinya justru akan menjadi beban demografi. Pasalnya, setelah ditilik lebih lanjut dari Laporan Statistik Pemuda Indonesia 2018, separuh dari generasi muda kita hanya menamatkan pendidikan setingkat sekolah menengah pertama ke bawah. Rendahnya capaian pendidikan mereka berkelindan juga dengan angka pengangguran terbuka yang meningkat.

### Tantangan Politik Generasi Muda

Persoalan ekonomi dan tenaga kerja ini bila tidak segera diselesaikan akan menimbulkan efek domino di berbagai aspek kehidupan lainnya. Salah satunya di bidang politik. Tanpa ada ketahanan ekonomi yang kuat, generasi muda kita memiliki risiko tinggi untuk tetap mewariskan politik uang dan praktik negatif yang mencoreng prinsip-prinsip demokrasi lainnya. Sebab poin kunci yang harus dipegang agar demokrasi berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan warga negara, yaitu perlunya negara menjadi agen yang dapat mengalokasikan sumber daya yang memadai berdasarkan prinsip keadilan sosial. Mirisnya, lobi-lobi kepentingan dan uang seakan tidak dapat dihindari ketika membahas pelaksanaan pemilihan, menjalankan pemerintahan, merancang undang-undang, dan menjalankan layanan publik.

Meski begitu, perlu dicatat bahwa persoalan politik uang yang menodai pemilu kita bukan hanya tentang jumlah uang dan bagaimana alokasinya. Persoalannya juga mencakup sistem alokasi dan dari mana uang itu berasal. Penyalahgunaan sumber daya, terutama uang dalam politik dapat merusak jalannya sistem demokrasi.

Melalui korupsi, uang dapat digunakan untuk mempengaruhi aktor dan institusi demokrasi untuk memihak kelompok dan kepentingan tertentu. Penggunaan dana yang tidak terkendali oleh para kandidat dan partai politik dapat membuat arena pemilu menjadi tidak seimbang.

Dana haram oleh kejahatan terorganisir dapat menyebabkan pelayanan publik tidak efisien atau terganggu. Oleh karena itu, penting bahwa dalam demokrasi penggunaan uang transparan, diawasi, dan diatur. Namun, sayangnya upaya sistematis untuk mewujudkan demokrasi yang jauh lebih substansial masih mengalami berbagai hambatan. Selain proses pengawasan demokrasi kita masih memiliki celah yang dapat diterobos oleh pihak yang berkepentingan, tantangan politik baru generasi muda di era masa kini datang dari enggannya perusahaan-perusahaan besar media sosial untuk menerapkan filter pada ujaran kebencian dan propaganda lain yang berdampak negatif pada keutuhan komunitas sosial masyarakat.

Bandingkan di era cetak dan penyiaran, di mana pengiklan membayar agar pesan mereka ditampilkan bersama konten yang diperiksa secara profesional. Surat kabar, majalah, acara radio dan televisi dan sebagian besar outlet lainnya memiliki staf editorial profesional yang secara manual dan hati-hati meninjau setiap bagian dari konten yang mereka terbitkan, memastikan bahwa iklan muncul di samping konten yang konsisten dengan undang-undang nasional dan kepekaan pengiklan tersebut.

Selain itu, pengiklan juga dapat memilih untuk menampilkan iklan mereka hanya di tempat umum atau hanya pada outlet-outlet tertentu dengan target audiens yang jauh lebih spesifik.

Kini semua hal tadi tidak berlaku di zaman digital. Sebaliknya, sekarang media sosial secara membabi buta menampilkan berbagai iklan dan konten yang dibuat oleh siapapun dengan filter atau proses editing yang bisa dikatakan nol besar. Orang-orang biasa dari seluruh dunia tanpa kontrol editorial dapat langsung memberikan opini atau menyebar argumennya (meski itu tidak dapat divalidasi) dalam bentuk apa pun. Pemilik media sosial dapat melihat promosi produk kemeja muncul di samping postingan yang menampilkan anak kucing lucu. Namun dengan pola algoritma lain, mereka juga akan dengan mudah menjumpai poster perekrutan kelompok radikal yang diiklankan secara terbuka.

Fokus perusahaan-perusahaan media sosial yang hanya mengejar untung ini tentu berdampak buruk pada keharmonisan sosial masyarakat. Tidak sekali dua kali kita saksikan bahwa konflik terjadi akibat tersebar pesannya berantai yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Namun di sisi lain, media sosial sudah menjadi sarana aktualisasi diri individu yang tak bisa kita hapus begitu saja keberadaannya.

Kemudahan komunikasi melalui media sosial tak bisa digantikan lewat perangkat tradisional lain yang kurang cepat dan tidak efektif. Persoalannya sekarang adalah bagaimana mengatasi berbagai persoalan politik ini sebelum dampak buruknya membayangi masyarakat kita yang terkenal akan slogan 'gemah ripah loh jinawi'nya ini.

### Peran Purna Praja dalam Politik Kebangsaan

Salah satu strategi yang dapat dioptimalkan untuk menghadapi tantangan politik tersebut adalah menguatkan peran purna praja baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menjadi teladan berpraktik dalam menyikapi kondisi masyarakat yang heterogen. Terlebih semasa pendidikan di Lembah Manglayang dan kampus-kampus daerah, pamong-pamong praja terus ditempa dan dididik untuk menjadi suri tauladan, yang tidak hanya lihai dalam menyampaikan motivasi secara lisan, namun juga menginternalisasi hal-hal baik dalam bentuk perbuatan.



Mengamalkan politik kebangsaan ala purna praja pun tak harus selalu identik dengan terjun langsung dalam politik praktis. Namun yang perlu ditekankan adalah memaksimalkan kinerja sebagai aparatur negara, termasuk melalui inovasi teknologi tanpa membedakan latar belakang masyarakat yang dilayani. Pun ketika bekerja dan mendapat kritik, tak lantas acuh dan menutup diri. Justru masukan yang disampaikan masyarakat dijadikan sarana perbaikan diri untuk terus berbenah ke arah yang lebih baik.

Harapannya, teladan terdepan purna praja dalam bekerja akan menjadi oase dari kealpaan pendidikan politik dari para elite politik tanah air. Sebab, yang dipertontonkan hari ini lebih pada transaksi politik daripada normativisme politiknya. Krisis moral para politikus menjadi tontonan setiap saat. Korupsi, indeks demokrasi yang menurun, pertumbuhan ekonomi yang jalan di tempat, sempitnya akses lowongan pekerjaan, semua itu kita rasakan saat ini. Seharusnya persoalan itu mengundang kesadaran dan keprihatinan. Alih-alih krisis ini menggugah kesadaran para pemimpin kita, yang ada justru fenomena buta politik yang amat meluas.

Maka dari itu, sudah sebaiknya pamong praja sebagai generasi pemimpin baru terus mencontohkan bagaimana gambaran politik bersih yang sarat dengan nilai (value). Ekspektasinya nanti di masa mendatang, bila gelombang contoh pemimpin baik terus bertambah banyak bukan tidak mungkin bahwa nilai-nilai Pancasila yang selama ini hanya tercantum sebagai dasar negara kita, dapat terwujud dan membawa negara Indonesia menjadi maju dan sejahtera.

## Penulis Hasna Azmi Fadhilah, S.STP, M.Res

DOSEN PADA INSTITUT  
PEMERINTAHAN  
DALAM NEGERI



## Isu Penghapusan Jabatan Gubernur, Efisien kah ???

Menjelang digelarnya pesta demokrasi rakyat Indonesia yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2024, pemerintahan Indonesia kembali dihebohkan dengan isu penghapusan jabatan gubernur. Isu ini mencuat ketika Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau lebih dikenal dengan Cak Imin mengeluarkan statement tentang usulan penghapusan jabatan gubernur di Indonesia karena dinilai tidak terlalu fungsional dalam sistem pemerintahan. Pernyataan Cak Imin ini tentu saja langsung mendapatkan beragam respon dari beberapa pihak. Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia dalam wawancaranya dengan tempo.co mengungkapkan bahwa pernyataan yang dikeluarkan Cak Imin ini dapat memecah konsentrasi pemerintah yang sedang mempersiapkan pemilu 2024. Menurut wacana penghapusan jabatan gubernur bukanlah pembahasan yang mudah, ia menyebutkan perlu adanya pembahasan yang mendalam serta pertimbangan urgensi dan fungsionalnya.

Lalu bagaimana tanggapan serta pandangan Teguh Ilham selaku dosen....dari sudut pandang akademisi terkait isu penghapusan jabatan gubernur ini ? apakah dengan meniadakan jabatan gubernur, struktur pemerintahan dan anggaran negara akan lebih efisien ?. Seperti yang diketahui bersama, IPDN merupakan perguruan tinggi kedinasan di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri dimana darisana lah lahirnya calon-calon Aparatur Sipil Negara yang kelak akan memimpin bangsa Indonesia. Menurut data yang diperoleh Bagian Humas IPDN, hingga tahun 2023 ini alumni IPDN yang menjabat sebagai Kepala Daerah yang mana salah satunya ialah Jabatan Gubernur telah mencapai 45 orang dan tak menutup kemungkinan akan bertambahnya calon-calon pemimpin daerah dari sekolah ini.

Perdebatan terkait isu kewenangan provinsi dan kab/kota dalam konteks otonomi sebenarnya sudah jauh terjadi sejak awal reformasi. Pada waktu itu para penggagas otonomi beradu argumen sejauh mana komposisi kewenangan daerah provinsi dan kab/kota. Kemudian seiring berjalannya waktu dan perubahan UU Pemda, terdapat dinamika komposisi kewenangan ini. UU pemda pada awalnya memberikan otonomi yg besar kepada kab/kota, sementara provinsi tidak disertai kewenangan sebesar kab/kota, dan ini menimbulkan masalah karena dengan anggaran yang dimiliki prov tidak sebanding dengan kewenangan yang diperoleh.

Kemudian pembuat kebijakan merespon dengan menarik beberapa urusan ke provinsi dengan digantinya uu pemda menjadi UU 32/2004 dan terus berlanjut pada UU 23/2014. Akan tetapi masalah lain juga masih tersisa, saya mengutip pandangan Dr. Muhadam pada aspek fungsi koordinasi, pembinaan, dan pengawasan (Korbinwas) gubernur yang dianggap tidak maksimal dimana pemerintah provinsi dalam hal peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah (PP 33/2018) tidak maksimal karena pada faktanya banyak kementerian lain (selain kemendagri) yang langsung berhubungan dengan kab/kota tanpa melalui provinsi.

Kondisi-kondisi tersebut menjadi acuan argumen dari pihak yang berpandangan 'ekstrim' untuk menghapus otonomi provinsi sehingga gubernur dianggap cukup ditunjuk oleh presiden saja. Saya melihat tujuannya adalah untuk menciptakan efektifitas pemerintahan karena gubernur secara utuh menjadi perpanjangan tangan presiden dan juga pada aspek efisiensi karena berbeda jika dilakukan dengan metode pemilihan, metode pengangkatan tidak membutuhkan anggaran yang besar dan mencegah politik uang dalam pemilihan langsung.

Sementara itu, pihak yang menolak isu ini menganggap Sistem pengangkatan gubernur dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan pemimpin, dan merugikan hak warga untuk memilih pemimpin yang diinginkan, atau dalam kata lain mengurangi demokrasi. Ini juga beralasan karena penunjukkan akan mengurangi bahkan menghilangkan demokrasi di level provinsi. Kelompok yang menolak juga curiga unsur politis menjadi lebih dominan karena isu ini dibangkitkan lagi menjelang pemilu serentak 2024, ini tentu saja memancing asumsi ada agenda politik tertentu yang dibawa oleh pihak tertentu.

Perdebatan terkait isu kewenangan provinsi dan kab/kota dalam konteks otonomi sebenarnya sudah jauh terjadi sejak awal reformasi. Pada waktu itu para penggagas otonomi beradu argumen sejauh mana komposisi kewenangan daerah provinsi dan kab/kota.

Kemudian seiring berjalannya waktu dan perubahan UU Pemda, terdapat dinamika komposisi kewenangan ini. UU pemda pada awalnya memberikan otonomi yg besar kepada kab/kota, sementara provinsi tidak disertai kewenangan sebesar kab/kota, dan ini menimbulkan masalah karena dengan anggaran yang dimiliki prov tidak sebanding dengan kewenangan yang diperoleh.



**Teguh Ilham, S.STP., M.A**  
DOSEN PADA INSTITUT  
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI



## PENGABDIAN MASYARAKAT



### IPDN BERGERAK CEPAT MENUJU LOKASI BENCANA BANJIR DI MANADO

Manado (30/01/2023), IPDN-Kemendagri bergerak cepat menuju daerah yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor. IPDN-Kemendagri turun langsung ke lapangan diwakili oleh IPDN kampus Sulawesi Utara yang terdiri atas 21 Aparatur Sipil Negara dan 21 orang satuan praja muda. Tak hanya membantu membersihkan lingkungan terdampak bencana, IPDN juga membawa bantuan berupa beras, minyak goreng, telur, mie instan, ikan kaleng, susu, bubur bayi dan juga Kasur lipat dan popok bayi. "Sesuai arahan Bapak Rektor, kami hadir di 3 kelurahan yang terkena dampak bencana cukup parah yakni Kelurahan Bailang, Kelurahan Mahawu dan Kelurahan Tumumpa Dua serta ada 2 masjid yakni Masjid Nurul Jannah dan Masjid Ibnuul Amin serta 1 gereja yakni Gereja GMIM Firdaus", ujar Direktur kampus Sulawesi Utara, Dr. Noudy R.P. Tendean, S.IP., M.Si. Tak hanya memberikan bantuan, tim IPDN juga melakukan pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pembagian obat-obatan serta vitamin kepada masyarakat yang berada di daerah terdampak.



"Selain membawa bantuan logistik, obat-obatan dan vitamin kami juga turut serta membantu masyarakat disana untuk membersihkan sisa-sisa bencana, dilapangan ini masih banyak sampah-sampah yang terbawa arus banjir sehingga kami melakukan penyisiran untuk mengumpulkan sampah-sampah tersebut. Kami juga membantu tim medis melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak", ujar Noudy. Kedatangan tim IPDN-Kemendagri ini disambut antusias masyarakat disana, mereka tak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh IPDN-Kemendagri, menurut masyarakat disana IPDN tidak hanya memberikan bantuan dan pulang tapi mereka secara ringan tangan turut serta membantu masyarakat untuk membersihkan lingkungan yang porak poranda diterjang banjir. "Kegiatan ini terlaksana atas arahan langsung Rektor IPDN, Bapak Hadi Prabowo, jadi kami atas nama masyarakat Manado juga mengucapkan terima kasih atas arahan dan petunjuk serta bantuan yang diberikan sehingga kegiatan baksos ini dapat berjalan dengan lancar", tutur Noudy.

Sumber : Humas IPDN





# PRAJA PEDIA

## Tanamkan Cinta Tanah Air, Praja IPDN Laksanakan Pembaretan di Gunung Manglayang

Jatinangor (26/01/2023). Tanamkan rasa cinta tanah air dan jiwa korsa, praja pratama angkatan XXXIII laksanakan kegiatan kemah juang dan pembaretan serta penyematan wings brevet di Gunung Manglayang. Kegiatan wajib ini dilaksanakan untuk meningkatkan daya juang, kedisiplinan dan menanamkan rasa cinta tanah air serta jiwa kebersamaan dan kekompakan praja.

Sejumlah 1.211 orang praja mengikuti kegiatan pembaretan dan kemah juang yang dilaksanakan pada tanggal 25 s.d. 26 Januari 2023.

"Ini merupakan langkah awal praja dalam menempuh pendidikan di IPDN. Sehingga nanti setelah selesai kegiatan diharapkan praja dapat lebih disiplin, memiliki jiwa kebersamaan, toleransi, solidaritas serta memiliki ketahanan fisik dan mental yang baik", ujar Dr. Drs. Hadi Prabowo, M.M selaku Rektor IPDN.



Kegiatan yang terlaksana atas komando dan bimbing langsung Kasat Manggala Praja IPDN, Brigjen Pol. Singgamata, S.I.K., M.H tak hanya diisi dengan menaiki gunung dan berkemah, praja juga melakukan reboisasi di jalur yang dilewati saat menuju puncak Gunung Manglayang. "Masing-masing praja diwajibkan membawa 1 bibit pohon pada saat menaiki gunung untuk ditanam di jalur yang pohonnya sudah tumbang dan rusak. Pada saat turun gunung pun mereka diwajibkan melakukan screening sampah disana", tuturnya.



Sesaat setelah selesai pembaretan, Hadi kembali mengingatkan praja pratama untuk terus bersyukur karena telah dapat menempuh pendidikan di IPDN. "Rasa syukur itu harus mereka (praja) jabarkan dalam implementasi 8 butir nilai-nilai astha brata". yakni berjiwa pancasila, unggul, profesional dan berintegritas, menguasai IPTEK dan berdaya saing, kader revolusi mental dan agen perubahan, mengayomi, melayani dan melindungi masyarakat, perekat persatuan dan kesatuan NKRI, berwawasan nasional dan global serta adaptif, inovatif, produktif dan kompetitif.



"Praja harus dapat memegang teguh dan menanamkan nilai-nilai tersebut pada jati diri serta menjadi prinsip hidup praja sehingga kelak setelah lulus menempuh pendidikan, praja akan menjadi Aparatur Sipil Negara yang memiliki intelektual dan berdaya saing dalam bertugas di pemerintahan daerah maupun pusat", tuturnya.



## PENINGKADERAN PRAJA



Praja ipdn baru saja melaksanakan rangkaian kegiatan Pengkaderan Praja bagi satuan Praja Madya Angkatan XXXI. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 minggu terhitung sejak tanggal 27 Januari 2023 yang dibuka langsung oleh Kepala Satuan Bina Pelatihan Praja, Brigjen Pol. John C. Nababan. Pengkaderan ini ialah proses pengelompokan praja ke dalam instansi/unit kegiatan yang ada dalam Manggala Korps Praja. Beberapa instansi/unit kerja yang ada dalam Manggala Korps praja yakni humas protokol, umum dan perlengkapan, program perencanaan dan keuangan, polisi praja dan lain sebagainya.



Dalam proses pengkaderan ini, satuan Praja Madya juga melakukan latihan fisik ringan seperti lari, push up, sit up dan lain-lain. Tujuan dilaksanakannya pengkaderan ini adalah untuk mengembangkan minat dan bakat praja khususnya dalam bidang pemerintahan sehingga nantinya praja sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan yang dilakukan di pemerintahan.

## PRAJA IPDN SIAP MENGIKUTI SELEKSI LPDP



Berdasarkan arahan dan petunjuk Menteri Dalam Negeri, IPDN kini fokus membina praja untuk mengikuti seleksi beasiswa LPDP. Khusus untuk satuan Praja Utama angkatan XXX, IPDN mewakili 90 orang praja untuk mulai mengikuti pelatihan Bahasa Inggris dalam rangka persiapan seleksi LPDP. IPDN bekerjasama dengan Schoters by Ruang Guru dalam memberikan pelatihan IELTS. Hal ini dilakukan agar praja memiliki pemahaman yang baik dalam menyusun essay untuk mendapatkan LoA (*Letter of Acceptance*). IPDN melalui Lab Bahasa juga memfasilitasi praja dengan website SIMOSA yang digunakan sebagai platform untuk mengunggah hasil latihan membuat essay. Praja IPDN yang saat ini tengah menjalani pelatihan, direncanakan akan mengikuti seleksi LPDP pada bulan Juni 2023.



## MENGENAL LEBIH DEKAT *Rektor IPDN*

Sebelum resmi menjabat sebagai Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri pada tanggal 20 Maret 2020, Dr. Drs. Hadi Prabowo, M.M pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2018. Beliau juga dipercaya memangku jabatan Pj. Gubernur Sumatera Selatan di tahun yang sama. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Pj. Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015-2016.

Alumnus Program Doktor dari IPDN dan Program Magister Manajemen di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini lahir di Klaten, Jawa Tengah pada tanggal 3 April 1960. Berbagai prestasi gemilang pernah Beliau catat, beberapa penghargaan atau tanda jasa pun pernah Beliau terima, diantaranya yakni tanda jasa Satyalancana karya satya 10 tahun, satyalancana karya satya 20 tahun, satyalancana karya satya 30 tahun, satyalancana pembangunan dalam bidang koperasi dan bintang jasa nararya.

Selain tanda jasa yang diberikan oleh Presiden RI, pada tahun lalu Beliau menerima penghargaan atas dedikasinya dalam penyelesaian batas wilayah negara Republik Indonesia-Malaysia periode 2017-2019.



Penghargaan tersebut diterimanya langsung dari Menkopolhukam Mahfud MD. Tanda jasa Satyalancana pembangunan bidang koperasi diberikan kepada Beliau oleh Wakil Presiden Budiono pada puncak peringatan hari Koperasi ke-65 tingkat nasional. Pada saat itu Beliau masih menjabat sebagai Sekda Provinsi Jawa Tengah. Tanda jasa ini diberikan atas peran aktifnya dalam pengembangan koperasi, seperti pengembangan jaringan usaha dan perluasan akses serta pangsa pasar koperasi dan UMKM.

Masih ada beberapa penghargaan yang berhasil Beliau raih, diantaranya yakni: Piagam Penghargaan sebagai Penggerak Inovasi Dan Tata Kelola Pemerintahan yang diberikan oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (2019), Piagam Penghargaan Congrock 17 sebagai motivator dan penggerak Keroncong Indonesia yang diberikan oleh

Congrock 17 Management (2019), Piagam Penghargaan Anugerah Pers 2019 Jawa Tengah dalam bidang pemerintahan yang diberikan oleh Persatuan Wartawan Indonesia Surakarta (2019), Piagam Penghargaan Pwi Jateng Award 2012 sebagai Pembina Birokrasi yang diberikan oleh Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Tengah (2012), Piagam Penghargaan Muri atas rekor Pemrakarsa Dialog Interaktif Antara Gubernur Dengan Masyarakat yang disiarkan secara langsung Oleh Penyiaran Terbanyak 347 Lembaga Penyiaran (340 Radio Dan 7 Televisi) yang diberikan oleh MURI (2011), dan lain sebagainya.



Setelah menjabat sebagai Rektor IPDN, beberapa prestasi dan inovasi juga ditorehkannya pada Kampus pelopor dan penggerak revolusi mental ini. Pada masa kepemimpinannya, IPDN telah berhasil mengembangkan Smart Campus Data Base.

# SEPATAH KATA

REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

“ Di era digital yang penuh perubahan, dinamika, percepatan, kompleksitas dan resiko, semuanya tidak mungkin selalu sesuai dengan apa yang kita rencanakan, oleh sebab itulah ASN harus memiliki value dan juga berakhlak. ASN pada era industri 4.0 dan society 5.0 harus mampu melakukan perubahan-perubahan baik pola pikir ataupun budaya kerja. Tidak boleh lagi bekerja pada hal-hal yang rutin, linier, pada zona nyaman, tidak ada tantangan dan tidak ada inovasi. Saya yakin IPDN kini telah berkembang menjadi kampus yang penuh disiplin dan tertib yang dilandasi semangat kekeluargaan, kebersamaan dan kebangsaan yang tinggi sehingga dapat bersaing di era digitalisasi seperti saat ini.

Sebagai penentu nasib bangsa kedepan, praja dan ASN IPDN harus dapat menjadi pandu semangat nasionalisme dan jiwa Pancasila serta perekat kesatuan dan persatuan bangsa. Mereka harus mampu memperkuat budaya kerja sehingga hal ini akan meningkatkan produktivitas dan produktivitas inilah yang akan meningkatkan kepuasan masyarakat. Saya yakin praja dan ASN IPDN dapat berkerja secara totalitas, lincah, responsif dan akuntable terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia”.

Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri  
Dr. Drs. Hadi Prabowo, M.M

Bhinneka Nara Eka Bhakti





## Informasi akses baca dan pengiriman konten bulletin

Redaksi menerima tulisan/ulasan/artikel/artikel ilmiah/opini/foto yang berkaitan dengan informasi kegiatan.

Redaksi akan menyunting tulisan/ulasan/artikel/artikel ilmiah/opini/foto yang diterima dan akan menyesuaikannya dengan tema dan ketersediaan rubrik/halaman dalam setiap edisinya.

Naskah/artikel dapat dikirimkan melalui email : [humasipdnnews@gmail.com](mailto:humasipdnnews@gmail.com) atau menghubungi Nindy (081312112159)